

Siaran Pers

UU HPP Membuka Peluang Penambahan BKC, CISDI Desak Pemerintah untuk Segera Masukkan Cukai Minuman Manis

Jakarta, 8 Oktober 2021 -- Center for Indonesia's Development Initiatives (CISDI) melihat adanya peluang memasukkan cukai minuman bergula dalam kemasan (MBDK) pada APBN 2022 setelah disahkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kamis (7/10) lalu.

Ayu Ariyanti, Project Lead Food Policy CISDI, mengatakan, “Meski cukup disayangkan cukai MBDK tidak secara eksplisit dimasukkan dalam UU HPP, tetapi kami optimis masih ada peluang menambahkannya ke daftar Barang Kena Cukai (BKC) pada tahun depan.”

“Ini sejalan dengan paparan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatakan bahwa pemerintah membuka kesempatan penambahan BKC dalam penyusunan RAPBN. Karenanya, kami mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti UU HPP dengan mengajukan cukai MBDK demi meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.”

“Kami khawatir penambahan dan penerapan cukai MBDK akan terulur-ulur seperti cukai plastik. Padahal, sangat penting bagi Indonesia untuk segera mengendalikan konsumsi minuman manis yang memiliki kaitan erat dengan prevalensi diabetes dan obesitas.”

Sebagai catatan, Indonesia menjadi negara dengan konsumsi MBDK ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan konsumsi sebanyak 20,23 liter/orang/tahun. Selain itu, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar, tren obesitas di Indonesia meningkat dari 10,3% pada 2007 menjadi 21,8% pada 2018 dan menurut riset yang sama, penderita diabetes juga mengalami tren kenaikan dari 5,7% pada 2007, melonjak ke 10,9% pada 2018.

Shita Dewi, peneliti dari Universitas Gadjah Mada, menambahkan, “Meningkatnya jumlah individu yang mengalami obesitas atau diabetes akan berdampak pada produktivitas masyarakat serta meningkatkan beban pembiayaan pengobatan yang pemerintah tanggung melalui Jaminan Kesehatan Nasional dalam jangka panjang. Cukai adalah salah satu instrumen kebijakan yang dapat mendorong perubahan perilaku, baik perilaku konsumen maupun produsen. Pendapatan dari cukai yang di-*earmarked* untuk sektor kesehatan juga berpotensi menjadi sumber baru untuk pembiayaan kesehatan. Cukai menjadi salah satu opsi kebijakan yang membuktikan peran multisektor untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan penyakit tidak menular.”

Laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pada 2017 menunjukkan 10,8 juta peserta adalah penderita diabetes dan pembiayaan layanan penyakit katastrofik mencapai Rp 14,6 triliun atau 21,8% dari total anggaran pelayanan kesehatan.

Lebih lanjut, dalam situasi pandemi ini, orang dengan penyakit tidak menular memiliki risiko lebih tinggi untuk terinfeksi dan mengalami keparahan akibat COVID-19. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyakit tidak menular.

Sementara itu, **Abdillah Ahsan, peneliti dari Universitas Indonesia**, menyatakan, “Cukai MBDK sudah beberapa kali dibahas dalam rapat dengan DPR RI, sehingga saya yakin sudah ada inisiatif baik dari pemerintah terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Ke depannya, tinggal memastikan dan mengawal perumusan RAPBN agar cukai MBDK dapat diinklusikan.”

“CISDI mendukung penuh masuknya MBDK dalam daftar BKC dan akan terus mengawal hingga penerapannya dilakukan,” ujar Ayu menutup penyatannya.

- SELESAI -

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah *think tank* yang mendorong kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah. Melalui program Food Policy, CISDI turut serta dalam pencegahan penyakit tidak menular. Program ini bertujuan menerapkan cukai minuman berpemanis yang berkaitan erat dengan kemunculan diabetes dan obesitas, dua penyakit mematikan di Indonesia, melalui metode riset ilmiah, advokasi kepada pembuat kebijakan, pelibatan komunitas dan anak muda, serta meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat melalui beragam kegiatan kampanye.

Informasi lebih lanjut silakan hubungi:

Sdri. Ardiani Hanifa Audwina

Content & Media Officer

Email: communication@cisdi.org

www.cisdi.org